

B u l e t i n



Biro Pemberitaan Parlemen

PARLEMENTARIA

Optimalisasi PMN Perkuat Industri Kereta Api

KETUA
Kerja BUMN
Jangan
Tumpang Tindih

KORPOLKAM
Percepat Revisi
UU LLAJ Demi
Kesejahteraan
Pengemudi

Nomor 1364/II/X/2025 Oktober 2025



9 772614 339005



Optimalisasi PMN Perkuat Industri Kereta Api



Komisi XI DPR RI menegaskan pentingnya pengawasan terhadap alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) yang telah diberikan pemerintah kepada sejumlah BUMN strategis, termasuk PT INKA. Demikian hal ini dirinya sampaikan saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke PT INKA, Madiun, Jawa Timur, Jumat (3/10).

Anggota Komisi XI DPR RI Mulyadi menegaskan pentingnya pengawasan terhadap alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) yang telah diberikan pemerintah kepada sejumlah BUMN strategis. Ia menekankan, PMN harus benar-benar dimanfaatkan secara tepat agar mampu mendorong peningkatan nilai, pelayanan, serta kontribusi dividen bagi pembangunan nasional.

"Kami dari Komisi XI ingin memastikan dalam konteks tugas pengawasan bahwa PMN yang sudah diberikan itu betul-betul teralokasikan dengan baik. Bukan saja pentingnya merespons

sebagai industri strategis, tapi juga bagaimana ada peningkatan nilai, peningkatan pelayanan, dan terpenting juga peningkatan kontribusi melalui dividen sehingga kekuatan fiskal melalui kontribusi dividen tersebut bisa berdampak signifikan terhadap *multiplier effect* pembangunan bangsa kita," ujar Mulyadi saat kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke PT INKA, Madiun, Jawa Timur, Jumat (3/10).

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sebelumnya telah mengalokasikan PMN sebesar Rp4,77 triliun kepada PT KAI, PT INKA, dan PT Pelni pada September 2025. Untuk PT INKA, PMN difokuskan pada pengembangan industri kereta api dalam negeri.

Dalam kesempatan tersebut, PT INKA memaparkan capaian kinerja sekaligus prospek ke depan, termasuk pengembangan produk kereta api buatan Indonesia yang kini telah memenuhi standar internasional dan berorientasi ekspor. Menanggapi, Komisi XI DPR menilai, keberadaan PT INKA tidak hanya penting dalam pemenuhan kebutuhan transportasi nasional, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai pemain industri strategis di pasar internasional. Dukungan optimal terhadap PT INKA diharapkan dapat memperkuat daya saing sekaligus mendorong kemandirian industri kereta api Indonesia. **est/rdn**



Kerja BUMN Jangan Tumpang Tindih



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani.

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mewanti-wanti agar tidak terjadi tumpang tindih peran antara regulator dan operator di BUMN. Pernyataan ini menjadi responsnya setelah DPR mengesahkan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN pada sidang Paripurna Keenam Masa Persidangan I 2025-2026, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).

Pasca beleid disahkan, kata Puan, maka secara tegas peran BUMN harus dijalankan. Ia pun berharap regulasi baru ini dapat memperkuat fungsi BUMN sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.

“Implementasi di lapangan akan menjadi tolok ukur. DPR akan terus mengawasi agar perubahan ini membawa manfaat nyata bagi masa depan Indonesia,” kata Puan dalam konferensi pers usai paripurna tersebut.

Seperti diketahui, DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diharapkan dapat memperkuat fungsi dan peran BUMN bagi kepentingan rakyat. Dengan payung hukum baru ini, sambung Puan, BUMN harus benar-benar menjalankan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. **ujm/rdn**



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH
Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si. (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
M. Ibnukhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI
Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Prima Danutirto, A.Md.
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Tiara Saum, S.I.Kom., Hira Askamal, S.I.Kom., Bianca Destianti, S.I.Kom., Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom., Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom., Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom., Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrullu, Puritno Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien, Yasmin Nabila

FOTOGRAFER
Naefuroji, Jaka Nugraha, Rumi Sari Budiaty, Arief Rachman, R. Kresno P.D. Moempoeni, Azka Restu Afidhillah, Geraldio Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh Farhan Nur Fikri, Mario Fernandez

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Ihsan Syahrezi, Aan Risdiana, M.Kom.

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom., Savant Rifqi Hidayat, S.E., Indah Ekawati, S.I.Kom.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)
Adi Ardiansyah, M.M.

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Percepat Revisi UU LLAJ Demi Kesejahteraan Pengemudi



FOTO: AZK/PDT

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal saat rapat dengan pemerintah dan Asosiasi Pengemudi Logistik Indonesia dan Asosiasi RBPI di DPR RI, Selasa (1/10/2025).

Para Pimpinan DPR RI bersama Komisi V DPR RI menggelar rapat dengan Menteri Perhubungan RI, Kementerian Sekretariat Negara, serta perwakilan dari Asosiasi Pengemudi Logistik Indonesia dan Asosiasi Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Selasa (1/10). Pertemuan tersebut membahas isu-isu strategis terkait keselamatan, kesejahteraan, serta kepastian hukum bagi pengemudi logistik yang selama ini menjadi salah satu ujung tombak distribusi barang di Tanah Air.

Wakil DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa forum sepakat mempercepat revisi Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Revisi undang-undang ini dinilai mendesak sebab aturan yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi lapangan

“Kesimpulan hasil rapat hari ini yang dihadiri Kementerian Perhubungan, Komisi V DPR RI, Kementerian Sekretariat Negara, serta asosiasi pengemudi, adalah percepatan revisi UU Nomor 22 Tahun 2009. Hal-hal yang disepakati akan lebih dulu dimasukkan dalam peraturan pemerintah sebelum revisi resmi dilakukan,” ujar Dasco.

Selain itu, forum tersebut juga memutuskan pembentukan tim kecil. Tim ini terdiri dari Komisi V DPR RI, Kementerian Perhubungan, kementerian

terkait, serta perwakilan asosiasi pengemudi. Tim kecil ini berfungsi untuk membahas hal-hal teknis yang seringkali menjadi kendala di lapangan, baik terkait regulasi maupun implementasi kebijakan. Dengan adanya tim kecil, koordinasi antara DPR, pemerintah, dan para pengemudi diharapkan menjadi lebih efektif.

Ke depan, dengan adanya revisi UU LLAJ serta pembentukan tim kecil, diharapkan setiap persoalan pengemudi dapat segera dicarikan solusi secara konkret. Pemerintah bersama DPR RI juga menegaskan komitmennya untuk terus melibatkan asosiasi pengemudi dalam proses perumusan kebijakan, sehingga regulasi yang lahir sesuai dengan kondisi di lapangan.

bit/rdn



Negara Harus Hadir Awasi Pembangunan Pesantren

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menilai negara harus hadir

dalam mengawasi pembangunan pesantren, khususnya terkait konstruksi bangunan, agar musibah serupa di Jawa Timur tidak kembali terjadi. Hal tersebut ia sampaikan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).

Cucun mengungkapkan pemerintah daerah dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sudah turun tangan dalam penanganan darurat. Namun, ia menekankan pentingnya langkah mitigasi, termasuk dukungan psikologis bagi para santri yang terdampak.

“Penguatan traumanya juga buat santri-santri yang kemarin mengalami musibah itu,” ujar Politisi Fraksi PKB itu.

Menurut Cucun, pesantren sejatinya menjadi mitra strategis negara untuk mencerdaskan bangsa, sehingga pemerintah seharusnya aktif membantu supervisi pembangunan gedung-gedung pesantren. “Selama ini pemerintah ada *nggak* hadir ikut mensupervisi tata cara membangun? Kita kan punya Kementerian PU yang urusan konstruksi,” ucapnya.

Ia menilai, beban biaya konsultan kerap memberatkan pihak pesantren. Karena itu, negara perlu masuk sejak tahap pengajuan izin bangunan agar kualitas konstruksi terjamin.

“Tanpa dimintapun sepertinya negara sudah hadir, karena ini

kalau dari sisi fungsi, beliau-beliau itu menghadirkan pendidikan, membantu negara. Nah sekarang negara tinggal hadir membantu

Pesantren sejatinya menjadi mitra strategis negara dalam mencerdaskan bangsa, sehingga pemerintah seharusnya aktif membantu supervisi pembangunan gedung-gedung pesantren

mereka meng-*guidance* cara-cara membangun pesantren yang selama ini belum pernah ada,” jelasnya.

Cucun juga mendorong agar ahli teknik sipil diturunkan untuk melakukan supervisi langsung pada ribuan pesantren di seluruh Indonesia. “Pesantren jumlahnya hampir 30 ribu lebih, ini bangunannya yang di atas dua lantai apakah kondisinya betul [belum]. Kalau misalkan *nggak* betul, perlu ada *placement*, sentuhan seperti apa, nah itu di-*guidance* oleh ahli-ahli sipil,” katanya. — **hal/rdn**

Wakil Ketua DPR RI
Cucun Ahmad Syamsurijal.



FOTO: MUN/PDT

Scan QR
untuk berita
selengkapnya





FOTO: ENO/PDT

Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang, Saan Mustopa, saat meninjau bandara di Bandung, Jumat (3/10/2025).

Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang, Saan Mustopa, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan pengelolaan dua bandara utama di Jawa Barat: Husein Sastranegara di Bandung dan Kertajati di Majalengka. Menurutnya, kedua bandara tidak boleh diperlakukan sebagai kompetitor, melainkan aset strategis yang harus saling melengkapi.

“Kita ingin yang mati bisa hidup, yang hidup tambah sehat. Jangan sampai karena ingin menghidupkan yang satu, yang lain justru ikut mati. Kedua bandara ini adalah aset Jawa Barat yang harus dimaksimalkan,” ujar Saan saat kunjungan kerja DPR RI ke Bandung, Jumat (3/10).

Pernyataan ini muncul setelah

Dua Bandara Bandung Jangan Saling Mematikan

DPR mendengarkan langsung pandangan dari Pemprov Jabar, Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura, Airnav Indonesia, hingga Danlanud Husein. Diskusi menyoroti tantangan di masing-masing bandara: keterbatasan operasional Husein dan rendahnya keterisian penerbangan di Kertajati.

Saan menegaskan, DPR RI akan merangkum seluruh masukan dan membawanya ke rapat di Senayan

untuk diformulasikan bersama instansi terkait. Tujuannya adalah memastikan kedua bandara dapat dioperasikan secara optimal tanpa saling mengorbankan.

“Bandara ini bukan sekadar proyek, tapi soal mobilitas masyarakat dan daya saing Jawa Barat. Maka langkah strategis harus diambil agar keduanya bisa berjalan seiring,” tambah Saan. **eno/aha**



Prinsip 'TNI Rakyat' Demi Indonesia Maju

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta menyampaikan apresiasi dan rasa hormat yang tinggi kepada seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ia menyebut TNI telah mendedikasikan pengabdian

terbaiknya dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta kehormatan bangsa Indonesia.

Hal ini disampaikan Sukamta dalam momentum Hari Ulang Tahun ke-80 TNI yang diperingati setiap tanggal 5 Oktober. Tidak hanya itu saja, ia menegaskan kekuatan TNI merupakan elemen utama dalam

sistem ketahanan nasional yang kokoh.

Di tengah perubahan geopolitik dan ancaman multidimensi, ketahanan nasional disebut tidak hanya bergantung pada kekuatan militer semata. "Tetapi juga pada sinergi antara pertahanan, kesejahteraan rakyat, ketahanan ekonomi, dan persatuan bangsa," kata Sukamta di Jakarta, Senin (6/10).

Pada HUT ke-80, TNI mengangkat tema 'TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju'. Adapun makna slogan 'TNI Prima' menggambarkan visi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto agar institusi pertahanan ini senantiasa profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.

Sementara, 'TNI Rakyat' merujuk pada jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara profesional, sekaligus tentara nasional. Sedangkan 'Indonesia Maju' berarti TNI tidak hanya memperkuat kemampuan tempur, tetapi juga mendukung program nasional melalui operasi militer selain perang (OMSP).

"Maka menjadi harapan kita bersama agar setiap prajurit TNI terus menjadi TNI Rakyat yang mampu menerjemahkan setiap sumpah prajurit dan sapta marga yang sebesar-besarnya bagi Negara serta kesejahteraan dan pertahanan rakyat," ungkap Politisi Fraksi PKS ini.

"Tentunya sekaligus menjadi TNI yang prima sehingga bisa turut bersumbangsih membawa menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang maju dan bangsa yang besar," tandasnya. **rnm/rdn**



Wakil Ketua Komisi I
DPR RI, Sukamta

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO: AFR/PDT



Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti saat mengikuti kunjungan kerja reses di Tarakan, Jumat (3/9/2025).

Hadapi TKD Turun dengan Efisiensi dan Relokasi Anggaran

Komisi II DPR RI menyoroti dampak penurunan Transfer ke Daerah (TKD) yang berimbas pada stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di berbagai provinsi, termasuk Kalimantan Utara. Dalam kunjungan kerja reses di Tarakan, Jumat (3/9), sejumlah Anggota Komisi II DPR RI menekankan pentingnya strategi efisiensi agar roda pemerintahan daerah tetap berjalan, satu di antaranya adalah

Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti.

“Penurunan TKD itu harus dilihat sebagai kebijakan Presiden Prabowo untuk mengukur apakah dengan pengurangan TKD daerah mampu mengambil inisiatif proaktif terhadap penyelesaian anggarannya. Tapi penurunan TKD itu kan sudah dihitung untuk beban-beban pelayanan minimal,” ujar Azis.

Dirinya menggambarkan kebijakan ini sebagai fase transisi

yang mirip dengan proses *molting* pada kepiting. “Nah TKD ini salah satunya adalah *molting* itu. Masa transisi yang rentan. Sehingga memang daerah-daerah harus memahami, kalau kita ingin berlandung pada cangkang yang lebih besar, bukan pada cangkang yang lama, kita harus *molting*. Seperti yang dilakukan oleh kepiting itu,” jelasnya.

Azis menekankan bahwa kunci bagi daerah adalah kemampuan menetapkan prioritas pembangunan. “Karena tanpa prioritas yang baik, negara mana pun tidak akan bisa untuk mencapai objektif kebutuhan dia,” tegasnya.

Ia juga menyinggung pentingnya penguatan kemandirian daerah melalui peningkatan kreativitas dan inovasi. “Inti dari semua otonomi daerah itu adalah kemandirian. Kemandirian daerah dalam mengelola pemerintahannya dalam memberikan pelayanan publik kepada rakyatnya,” pungkash Azis.

aha



Ingatkan Polri Publikasi Berantas Tambang Ilegal

Anggota Komisi III DPR RI, Martin D. Tumbelaka, menegaskan pentingnya transparansi dan publikasi kinerja Polri agar masyarakat dapat melihat secara nyata berbagai capaian positif institusi tersebut. “Kami di Komisi III terus mendorong perbaikan institusi Polri. Polri ini adalah institusi yang paling dekat dengan masyarakat, bersentuhan langsung dengan persoalan kamtibmas. Karena itu, setiap program baik yang dijalankan Polri harus dipublikasikan secara luas agar masyarakat tahu bahwa Polri bekerja luar biasa untuk mereka,” ujar Martin kepada **Parlementaria** usai Kunjungan Reses di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin, (6/10).

Dirinya juga menekankan, publikasi yang kuat bukan hanya memperkuat kepercayaan publik

terhadap Polri, tetapi juga menjadi bentuk akuntabilitas kinerja aparat penegak hukum di mata masyarakat. Tidak hanya itu, Komisi III DPR juga membahas berbagai isu strategis, salah satunya penanganan tambang ilegal.

Menurut Martin, praktik pertambangan tanpa izin menimbulkan kerugian negara yang sangat besar, baik dari sisi pajak maupun potensi pendapatan daerah. “Kami mengapresiasi langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolda NTB. Mereka sudah punya program untuk

memberantas tambang ilegal,” jelasnya.

Ia turut menambahkan, berdasarkan paparan dari kepolisian, potensi kerugian negara akibat tambang ilegal di salah satu wilayah Indonesia bisa mencapai Rp 33 triliun dalam dua tahun terakhir. Menutup pernyataan, ia mendorong penerapan program serupa di wilayahnya, mengingat provinsi tersebut juga menghadapi masalah serius terkait tambang ilegal.

“Saya ingin membawa program Polda NTB ini untuk diterapkan di Sulawesi Utara. Prinsipnya sama: menutup kebocoran di sektor sumber daya alam, menambah pemasukan negara, dan memberikan perlindungan bagi para pekerja tambang,” tandasnya.

— **upi/aha**

Anggota Komisi III DPR RI, Martin D. Tumbelaka, saat mengikuti Kunjungan Reses di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin, (6/10/2025).



FOTO: ULF/PDT

Cesium-137 Potensi Hambat Ekonomi Hijau Negara



FOTO: OJI/PDT

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyoroti temuan kontaminasi zat radioaktif Cesium-137 pada produk cengkeh asal Indonesia. Menurutnya, temuan tersebut mengancam gagasan ekonomi hijau yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Produk Cengkeh ini merupakan tanaman rempah yang telah diminati berbagai bangsa dari belahan dunia sejak dulu kala. Sebagai negara penghasil cengkeh terbesar di dunia, kita semua harus melindungi tanaman rempah ini, agar bisa terus diperdagangkan

secara leluasa di pasar global,” kata Alex di Jakarta, Rabu (1/10).

Pernyataan ini disampaikan Alex sebagai respons atas temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau *Food and Drug Administration* (FDA) yang melaporkan adanya kontaminasi Cesium-137 pada cengkeh asal Indonesia. Sebelumnya, FDA juga menemukan kasus serupa pada produk udang beku dari Indonesia.

Adapun Cesium-137 adalah salah satu zat radioaktif yang bisa mencemari makanan dan berisiko membahayakan kesehatan. Meski kadar radiasi Cesium-137 yang ditemukan FDA pada cengkeh asal

Indonesia masih dinyatakan dalam ambang aman, ia menekankan pentingnya kewaspadaan karena kontaminasi ditemukan di dalam kontainer pengiriman.

Sebab itu, Alex menekankan perlunya pelibatan aktif Bapeten dalam proses impor bahan pangan, bersama Badan Karantina, BBPOM, dan lembaga lainnya. Namun, menurutnya, perlu dijaga agar penambahan lembaga tidak menghambat jalannya usaha.

“Untuk menjaga industri bahan pangan kita, semestinya memerlukan tambahan lembaga agar konsumen terlindungi secara maksimal. Namun, jangan sampai penambahan itu, jadi hambatan baru,” tutup Alex. **rdn**



Jangan Ada Pengemudi Tertindas dalam Rantai Logistik Nasional

Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi menegaskan negara tidak boleh membiarkan pengemudi berada di posisi paling lemah dalam rantai logistik nasional. Menurutnya, selama ini setiap terjadi kecelakaan, pengemudi yang selalu menanggung beban hukum, sementara pemilik kendaraan dan pemilik barang seakan lepas dari tanggung jawab.

Diketahui, saat ini Komisi V DPR RI secara khusus sedang membahas revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta implementasi kebijakan Zero ODOL (*Over Dimension Overloading*) yang

ditargetkan berlaku penuh pada 2027.

“Selama ini pengemudi selalu jadi pihak paling lemah. Dalam kasus kecelakaan, merekalah yang dipenjara, sedangkan pemilik kendaraan dan pemilik barang tidak tersentuh. Negara wajib hadir untuk menata ulang tanggung jawab secara berlapis agar ada keadilan, sehingga pengemudi tidak lagi dijadikan kambing hitam,” tegas Hadi di Jakarta, Minggu (5/10).

Hadi menambahkan bahwa revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus menjawab berbagai persoalan mendasar yang dihadapi pengemudi, mulai dari jam kerja yang manusiawi, perlindungan hukum, jaminan

sosial, hingga akses terhadap perumahan dan pendidikan anak-anak mereka. Ia menilai, pembentukan Panja Revisi UU di Komisi V DPR dan pembentukan tim kecil bersama Kemenhub serta asosiasi pengemudi merupakan langkah maju untuk memastikan semua aspirasi tersebut masuk dalam substansi revisi undang-undang.

“Komitmen ini bukan hanya soal penegakan aturan ODOL, tapi juga soal masa depan para pengemudi dan keluarganya. Negara wajib hadir dengan kebijakan yang adil dan humanis, sehingga pengemudi tidak lagi ditinggalkan, melainkan dilibatkan sebagai bagian penting dari sistem transportasi dan logistik nasional,” tutup Abdul Hadi. 



Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi.

Wisata Kesehatan Bali Jadi Model Diversifikasi Ekonomi Strategis

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menilai pengembangan wisata kesehatan (*medical tourism*) di Bali merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Menurutnya, sektor ini bisa menjadi model diversifikasi yang tangguh, mengingat pariwisata konvensional sangat mudah terdampak krisis.

“Ini kalau menurut saya menarik. Ini model diversifikasi secara komplit. Karena, Provinsi Bali ini pertumbuhan ekonomi menjadi

yang tercepat di Indonesia di antara provinsi-provinsi lainnya. Tentunya seperti Jakarta, Surabaya, ini memang cepat juga. Pilihan strategi untuk ada menampilkan atau menyediakan tentang kesehatan, wisata kesehatan, yang menjadi satu kesatuan itu sangat strategis,” kata Anggia kepada *Parlementaria* usai mengikuti rapat Kunjungan Kerja Masa Reses (Kunres) Komisi VI DPR RI ke Kota Denpasar, Provinsi Bali, Jumat (3/10).

Politisi Partai PKB ini menegaskan bahwa wisata

kesehatan juga bisa menjadi solusi untuk mengurangi angka masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri. Yakni Malaysia, Singapura, hingga Korea Selatan. “Sebenarnya kesehatan ini, kita menghindari banyak sekali penduduk Indonesia, masyarakat Indonesia yang perginya ke rumah sakit-rumah sakit di luar negeri. Contohnya, Malaysia dan Singapura. Kita sediakan disini. Bahkan, disini ada juga *Stem Cell*, lalu kemudian estetika untuk kecantikan, itu juga disediakan,” ujarnya.

Meski membutuhkan investasi yang besar, Legislator Dapil Jawa Timur ini optimistis proyeksi wisata kesehatan di Bali menjanjikan. Namun, ia menekankan perlunya dukungan ekosistem yang memadai, mulai dari konektivitas, logistik, hingga rantai pasok yang kuat.

“Ini investasi yang bagus, yang besar juga investasinya, tetapi proyeksinya sebenarnya bagus. Tinggal bagaimana kemudian, kita menawarkan yang kompetitif,” pungkasnya. **aas/aha**



FOTO: AAS/PDI

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, saat mengikuti rapat Kunjungan Kerja Masa Reses (Kunres) Komisi VI DPR RI ke Kota Denpasar, Provinsi Bali, Jumat (3/10/2025).

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Dukungan Penuh bagi Industri *Board Game* Lokal



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI ke Tabletoys, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (30/9/2025).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengapresiasi capaian *Tabletoys Board Games Library, Cafe, and Store* di Surabaya yang berhasil membawa board game karya anak bangsa menembus pasar internasional. Menurutnya, keberhasilan *Tabletoys* membuktikan subsektor gim mampu menjadi motor baru bagi ekonomi kreatif nasional.

"Saya bangga mendengar langsung presentasi dari teman-teman *Tabletoys*. Ini bukan lagi kategori perintis, melainkan pelaku industri kreatif yang sudah berhasil menembus pasar global. Produk

mereka sudah dipasarkan ke berbagai negara, mulai dari Prancis, Italia, Jerman, Korea, Thailand, Hungaria, Belanda, hingga Amerika Latin," ujar Evita saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI ke *Tabletoys*, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (30/9).

Evita menilai capaian tersebut semakin istimewa karena seluruh proses dilakukan sepenuhnya oleh anak bangsa. "Kreatornya orang Indonesia, inovasinya orang Indonesia, *publisher*-nya juga kita sendiri, bahkan sampai ke *marketing*-nya. Ini bukti nyata kreativitas kita bisa bersaing di kancah global," jelasnya.

Menurutnya, *board game* memiliki keunikan tersendiri

dibanding gim digital. Tidak hanya menjadi sarana hiburan, *board game* juga menghadirkan nilai sosial. Ia mencontohkan permainan tradisional seperti monopoli atau ular tangga yang mampu mengasah otak sekaligus mempererat kebersamaan keluarga.

Sebagai tindak lanjut, Komisi VII akan memperkuat dialog dengan asosiasi dan pelaku industri board game. Tujuannya agar kebijakan yang lahir dari parlemen benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. "*Board game* adalah subsektor yang potensinya sangat besar. Kita ingin industri ini tumbuh berkelanjutan dan menjadi kebanggaan ekonomi kreatif Indonesia," tutup Evita. ica/aha



Harus Proaktif Data Kelayakan Infrastruktur Ponpes di Indonesia

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendorong Kementerian Agama (Kemenag) lebih proaktif mendata kelayakan perkembangan pesantren di daerah. Diketahui, Kemenag memiliki satuan kerja yang menangani hal tersebut, khususnya, di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis), yang membawahi Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren).

“Pemerintah pusat melalui

Kementerian Agama dan Ditjen Pendidikan Islam, harus bisa lebih proaktif mendata ponpes-ponpes yang memerlukan tambahan infrastruktur, termasuk bangunan asrama. Kalau kapasitasnya sudah berlebihan, menjadi tugas pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan,” imbuh pria yang kerap disapa Kyai Maman ini di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Sabtu (4/10).

Politisi Fraksi PKB ini mengatakan pembangunan

pesantren sering kali dilakukan secara mandiri oleh pengelola dengan sumber daya terbatas. Kondisi itu kerap membuat pembangunan dilakukan ala kadarnya tanpa memenuhi standar teknis konstruksi.

“Tiap tahun santrinya bertambah, lalu Ponpes di daerah-daerah inisiatif melakukan pembangunan mandiri yang tidak melibatkan ahli konstruksi bangunan yang tersertifikasi. Seperti diameter besi yang tidak sesuai, tiang pancang yang kurang sesuai untuk bangunan bertingkat, konstruksi tangga yang tidak sesuai standar, dan sebagainya,” ungkap legislator asal Dapil Jawa Barat IX itu.

Kyai Maman mendorong agar pemerintah pusat maupun daerah mengambil peran nyata, baik sebagai fasilitator, pengawas, maupun memberi bantuan teknis. Ia menegaskan, pembangunan pesantren adalah tanggung jawab bersama: pengasuh, pengelola, pemerintah, dan masyarakat.

— oji/rdn



FOTO: OJI/PDT

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq saat Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Sabtu (4/10/2025).



Kemhan Sebar Multivitamin, Pentingnya Sinergi Antarlembaga

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyambut baik langkah Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang menyalurkan 4,8 juta butir multivitamin kepada sekitar 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Jakarta. Namun, ia mengingatkan agar Kemhan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Saya menghargai langkah Kementerian Pertahanan yang ingin berkontribusi dalam memperkuat ketahanan kesehatan rakyat melalui distribusi multivitamin ke Dapur Makan Bergizi (MBG). Namun, semangat baik tersebut harus tetap berada dalam koridor sistem kesehatan nasional. Sebagaimana diatur oleh undang-undang dan dikoordinasikan dengan kementerian serta lembaga teknis yang berwenang, seperti Kementerian Kesehatan dan BPOM,” kata Nurhadi di Jakarta, Selasa (7/10).

Nurhadi menyebut distribusi obat dan vitamin bukan sekadar kegiatan logistik, tetapi menyangkut aspek keselamatan publik. Karena itu, ia mengingatkan agar setiap produk yang beredar dan dikonsumsi masyarakat harus melalui proses uji, pengawasan, dan sertifikasi yang ketat agar tidak

menimbulkan risiko kesehatan.

Seperti diketahui, Kemhan menyalurkan 4,8 juta butir multivitamin kepada sekitar 100 SPPG alias dapur MBG di wilayah Jakarta pada Rabu (1/10). Multivitamin bernama Vitarma ini merupakan produk Pusat Farmasi Pertahanan, Pabrik Obat Pertahanan Negara, di bawah Kementerian

Pertahanan, sebagaimana keterangan kemasan kardus multivitamin itu.

Selain vitamin, Kemhan juga menyerahkan 17,4 juta butir obat kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Obat-obatan tersebut akan didistribusikan melalui koperasi desa dan kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di seluruh pelosok tanah air.

— rnm/rdn

Distribusi obat dan vitamin bukan sekadar kegiatan logistik, tetapi menyangkut aspek keselamatan publik.

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi.



FOTO: EOT/VEL



Riset dan Regulasi Lemah, Cagar Indonesia Bakal Mati

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti kelemahan serius dalam tata kelola cagar budaya di Indonesia. Menurut pria yang akrab disapa Fikri ini, kegagalan menyediakan riset yang memadai dan kerangka regulasi yang kokoh membuat kekayaan budaya nasional terancam hancur dan tidak mampu bersaing dengan situs global.

Dalam konteks cagar budaya di Indonesia, Fikri menyoroti dua masalah utama kerangka regulasi dan anggaran. *Pertama*, kata dia, mandat hukum yang tidak dijalankan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengamanatkan pembentukan Badan Pengelola di Pasal 97, tetapi amanat ini tidak pernah dilaksanakan selama 15 tahun (hingga 2025). Kondisi ini

menciptakan kelemahan tata kelola yang serius.

Yang *kedua*, imbuhnya, adalah kewenangan pemerintah daerah kabur. Tidak adanya mandat formal yang kuat dari pusat membuat Pemerintah Daerah (Pemda) sulit untuk membentuk Dinas Kebudayaan atau mengalokasikan anggaran.

"Akibatnya, banyak Pemda menggabungkan Dinas Kebudayaan dengan dinas lain. Kelemahan

kewenangan ini berdampak pada intervensi daerah. Fikri mencontohkan Pemda bahkan tidak berani mengalokasikan anggaran untuk perbaikan kecil seperti pagar atau lampu di situs cagar budaya (misalnya Gedong Songo) karena takut menjadi temuan BPK," ungkap Fikri di Jakarta, Minggu (5/10).

Menutup pernyataan, ia menekankan, perlu ada keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan prinsip konservasi, di mana pembatasan jumlah pengunjung (seperti di Borobudur) merupakan salah satu upaya menjaga daya dukung lingkungan.

Fikri mendesak agar masalah kewenangan ini segera diselesaikan, termasuk dengan memberi masukan kepada Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), agar Pemda memiliki peran dan peduli terhadap eksistensi budaya.

 rdn

Anggota Komisi X DPR RI
Abdul Fikri Faqih.



Tekan Penyimpangan Subsidi Listrik Lewat Integrasi Data dan Transparansi Harga

Komisi XI DPR RI memperingatkan risiko bocornya subsidi listrik jika integrasi data penerima tidak dilakukan secara ketat dan struktur harga listrik tidak dikelola secara transparan. Sebab itu, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menegaskan bahwa subsidi listrik yang dibayar melalui APBN bernilai puluhan triliun rupiah harus benar-benar tepat sasaran.

"Subsidi listrik ini adalah wujud kehadiran negara. Tapi kalau struktur biaya tidak jelas dan data penerima tidak terintegrasi, bisa jadi banyak yang tidak berhak justru ikut menikmati," ujar Misbakhun usai agenda Kunjungan Kerja Komisi XI DPRI ke PT PLN UP3 Surakarta di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (3/10).

Menurutnya, sinkronisasi data antara PLN dengan program bantuan sosial lain, seperti bedah rumah dan bansos tunai, menjadi penting agar subsidi tidak tumpang tindih. Ia menekankan perlunya pembaruan data penerima karena tidak sedikit masyarakat yang sudah meningkat taraf hidupnya, namun masih tercatat sebagai penerima subsidi.

"Update data sangat penting agar masyarakat tahu dia menerima subsidi atau tidak. Ini soal keadilan dan akuntabilitas," tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Selain masalah data, dirinya juga menyoroti struktur harga listrik yang menjadi dasar perhitungan subsidi. Tarif listrik yang dibayar masyarakat,



Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun saat Kunjungan Kerja Komisi XI DPRI ke PT PLN UP3 Surakarta di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025).

menurutnya, tidak sepenuhnya mencerminkan harga pasar karena sudah melalui proses audit harga pokok penyediaan listrik (BPP).

Dalam perhitungan itu terdapat sejumlah komponen biaya, mulai dari bahan bakar seperti batu bara, operasi dan pemeliharaan, investasi, hingga cadangan daya yang harus

tersedia ketika terjadi perbaikan jaringan. "Komponen harga listrik ini harus transparan. Ada biaya cadangan, ada biaya perawatan, semua itu masuk ke struktur harga. Jika efisien dan kontraknya transparan, maka subsidi dari APBN akan lebih tepat guna," tandasnya.

um/rdn

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Selesaikan PI 10 Persen dan Izin Tambang Rakyat di Jambi



FOTO: ULF/PDT

Anggota Komisi XII DPR RI, Cek Endra, saat mengikuti Kunjungan Spesifik di Provinsi Jambi, Rabu (1/10/2025).

Anggota Komisi XII DPR RI, Cek Endra, menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian *Participating Interest* (PI) 10 persen bagi Pemerintah Provinsi Jambi serta penerbitan izin tambang rakyat guna memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat. Dirinya mengapresiasi progres pengajuan PI 10 persen dari PT Jadestone Energy kepada Pemprov Jambi yang sudah mencapai tahap akhir.

Menurutnya, langkah tersebut akan menjadi tonggak penting bagi peningkatan pendapatan daerah dari sektor migas. “*Alhamdulillah* kami melihat progresnya sudah 95 persen,

sudah *due diligence*, dan insya Allah bisa diselesaikan menjelang akhir tahun ini. Jadestone akan menjadi perusahaan pertama di Jambi yang menandatangani persetujuan PI 10 persen. Mudah-mudahan langkah ini diikuti perusahaan minyak lain di Jambi,” jelas Cek Endra kepada *Parlementaria* usai Kunjungan Spesifik di Provinsi Jambi, Rabu (1/10).

Lebih lanjut, Cek Endra menekankan bahwa PI 10 persen akan memberikan dampak besar bagi keuangan daerah. “Ini cukup membantu untuk menambah anggaran dan pendapatan Provinsi Jambi,” tambahnya.

Selain persoalan PI, Komisi XII juga menyoroti pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 14 terkait izin pertambangan rakyat. Berdasarkan laporan Gubernur, terdapat sekitar 19 ribu sumur minyak ilegal yang selama ini dikelola masyarakat di Jambi. Dengan adanya regulasi baru, masyarakat kini bisa mengajukan izin tambang rakyat melalui koperasi, BUMD, atau UMKM daerah.

“Harapan kami izin tambang rakyat ini segera diterbitkan sehingga masyarakat bisa menambang dengan aman, baik minyak maupun emas. Ini bukan hanya menambah *lifting* nasional, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi masyarakat,” tegas Cek Endra.

upi/aha



Sinkronisasi Hukum Pusat dan Daerah Sangat Penting

Anggota Komisi XIII DPR RI Ahmad Basarah menekankan pentingnya harmonisasi dan sinkronisasi pembentukan hukum antara pusat dan daerah. Hal itu ia sampaikan dalam kunjungan kerja reses Komisi XIII DPR RI di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (3/10). “Dalam Perpres 139/2024, Kementerian Hukum itu bertugas memimpin, mengkoordinasikan,

urusan pemerintahan di bidang hukum. Karena kita menganut negara kesatuan, bukan federalisme, maka pembentukan hukum di Kepulauan Riau, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dia terintegrasi dengan pembentukan hukum secara nasional,” tegas Basarah.

Menurutnya, Kanwil Kemenkumham Kepri memiliki tanggung jawab memberikan pendampingan dan masukan

hukum kepada pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan.

“Tugas dan tanggung jawab Kementerian Hukum Kepri, dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang hukum, adalah membantu, memberikan *advice* kepada pemerintah daerah dalam pembentukan hukum-hukum atau norma-norma hukum di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” jelasnya.

Untuk itu, Basarah mempertanyakan sudah sejauh mana kerja sama Kanwil Kemenkumham Kepri dengan Pemerintah Daerah dalam proses harmonisasi Peraturan Daerah (Perda). “Pertanyaan saya, sudah adakah bentuk kerjasama Kanwil Hukum Kepri dengan Pemda Kepulauan Riau dalam rangka pembentukan Perda Kabupaten/Provinsi maupun Kabupaten/Kota?” tanya Basarah.

Menanggapi hal itu, Kepala Kanwil Kemenkum Kepri, Edison Manik menerima masukan yang disampaikan basara. Dalam kesempatan yang sama, ia mengakui Kanwil Kemenkum memiliki sejumlah kendala di lapangan. Kemenkumham di daerah, jelasnya, seringkali hanya diposisikan pada tahap harmonisasi rancangan, sementara implementasi dan pengundangan lebih didominasi oleh aparat penegak hukum (APH).

 hal/aha

Anggota Komisi XIII DPR RI, Ahmad Basarah, dalam kunjungan kerja reses Komisi XIII DPR RI di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (3/10/2025).

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO: HAL/PDT

Apresiasi Pemilu Suriah Langkah Penting Menuju Stabil

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyampaikan doa dan dukungan kepada rakyat Suriah atas terselenggaranya pemilihan umum untuk membentuk parlemen baru. Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, berharap proses politik ini dapat menjadi langkah penting menuju stabilitas, perdamaian, dan kemajuan bangsa Suriah.

“Pemilihan Parlemen merupakan momentum berharga bagi rakyat Suriah untuk memperkuat

semangat persatuan, memperdalam dialog nasional, dan meneguhkan komitmen terhadap pembangunan bersama. Kami di BKSAP DPR RI mendoakan agar proses ini berlangsung damai, terbuka, dan membawa harapan baru bagi seluruh rakyat Suriah,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada *Parlementaria*, di Jakarta, Senin (6/10).

Pada hari Minggu, tanggal 5 Oktober 2025, warga Suriah tampak antusias mendatangi sejumlah tempat pemungutan

suara di berbagai wilayah, termasuk di ibu kota Damaskus, Suriah. Pemilu ini menandai babak baru dalam perjalanan politik Suriah. Di gedung Perpustakaan Nasional Damaskus, anggota dewan elektoral juga terlihat memberikan suara mereka untuk memilih kandidat parlemen yang akan membentuk pemerintahan baru.

“Indonesia melalui BKSAP DPR RI siap memperkuat jalinan kerja sama dengan Suriah dengan saling menghormati dan mendukung semangat perdamaian, stabilitas, serta pembangunan berkelanjutan di Kawasan,” jelas Politisi Fraksi PKS ini.

BKSAP DPR RI juga menegaskan komitmen untuk terus mendukung aspirasi rakyat Suriah menuju kehidupan yang aman, sejahtera, dan bermartabat. “Kami percaya bahwa demokrasi yang sehat dan parlemen yang kuat akan menjadi fondasi penting bagi Suriah dalam membangun masa depan yang damai dan berkembang,” tutup Mardani. — **tn/rdn**



FOTO: DOK/PDT

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera.



Cakrawala Buka Aspirasi Publik Kepada DPR



Anggota DPR RI Desi Ratnasari saat peluncuran aplikasi Cakrawala di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Anggota DPR RI Desi Ratnasari menyambut positif peluncuran aplikasi Cakrawala (Citra Aspirasi, Keterbukaan dan Wawasan Parlemen) yang digagas Pusat Teknologi Informasi (Pustekinfo) Sekretariat Jenderal DPR RI hari ini. Ia berharap, inovasi digital ini dapat menjadi media bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, aspirasi, hingga kritik kepada parlemen.

"Semoga ini bisa menjadi sebuah media bagi masyarakat untuk bisa menyampaikan pengaduannya, laporannya, keluhannya, aspirasinya, kritiknya, apapun itu bentuk yang ingin mereka sampaikan, komunikasi dengan anggota DPR maupun dengan Sekretariat Jenderal," ujar Desi

kepada *Parlementaria* usai peluncuran aplikasi Cakrawala di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Desi menilai penting adanya standar pelayanan agar setiap aduan masyarakat dapat ditindaklanjuti. "Semoga ada kategorisasi, selesai diterima oleh Sekretariat Jenderal DPR RI lalu kemudian selesai juga pengaduan tersebut direspon oleh anggota DPR dengan membicarakan dan membahasnya dengan mitra kerjanya. Yang penting ada jawaban yang memenuhi harapan dan kebutuhannya. Paling tidak, kalau kata orang Sunda *tuh ngaregreng hatinya* (menenangkan hati masyarakat) atas aduan yang disampaikan," jelasnya.

Lebih lanjut, Desi menekankan

bahwa Cakrawala juga mendukung keterbukaan informasi terkait fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. "Insya Allah risalah rapat, hasil rapat, atau bagaimana proses dalam rapat juga bisa diakses melalui aplikasi Cakrawala maupun media lain yang dimiliki parlemen," katanya.

Menutup pernyataannya, Desi optimis bahwa kehadiran Cakrawala mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPR RI. "Tentunya support system yang ada di Sekretariat Jenderal harus berinovasi agar muncul 'engagement' dari masyarakat. Pada akhirnya aplikasi Cakrawala ini bisa memberikan dampak tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga DPR RI semakin meningkat di kemudian hari, amin, insya Allah," pungkasnya.

hal/aha





FOTO: GER/PDT

Wakil Ketua MKD DPR RI, Agung Widyantoro, dan Imron Amin, saat kunjungan kerja spesifik MKD ke Polres Brebes, Senin (29/9/2025).

Sinergi dengan Polres Brebes, Tegakkan Etika Legislatif

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terus memperkuat perannya sebagai penjaga marwah dan etika lembaga legislatif. Hal ini tercermin dalam kunjungan kerja spesifik MKD ke Polres Brebes, Senin (29/9), yang bertujuan membangun sinergi dengan jajaran kepolisian, khususnya pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan kode etik anggota dewan di lapangan.

Rombongan MKD yang dipimpin Wakil Ketua MKD DPR RI, Agung Widyantoro, dan Imron Amin, disambut langsung oleh Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah beserta jajaran. Agung menjelaskan bahwa MKD

memiliki mandat strategis dalam menjaga kehormatan DPR RI serta mengawasi perilaku anggota dewan melalui penegakan kode etik.

Dirinya menjelaskan bahwa MKD memiliki mandat strategis dalam menjaga kehormatan DPR RI serta mengawasi perilaku anggota dewan melalui penegakan kode etik. "Tugas utama MKD adalah menjaga marwah lembaga DPR sekaligus memastikan setiap anggota dewan menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi etika dan peraturan," ujar Agung.

Legislator Partai Golkar ini menambahkan, kunjungan ke institusi kepolisian menjadi bagian penting dari upaya MKD memperluas pemahaman mengenai mekanisme pengawasan dewan. Hal

ini diharapkan mampu menciptakan sinkronisasi antara penegakan etika legislatif dengan hukum positif yang dijalankan oleh aparat kepolisian.

Dalam kesempatan tersebut, MKD juga melakukan sosialisasi terkait hak-hak anggota DPR RI, antara lain Hak Protokoler, Hak Imunitas, serta penggunaan TNKB khusus bagi pimpinan dan anggota DPR sesuai Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 5 Tahun 2024.

"Melalui sosialisasi ini, MKD berharap aparat kepolisian di daerah memahami secara tepat posisi dan perlindungan hukum terhadap anggota dewan, sekaligus tetap menegakkan aturan secara proporsional jika terjadi pelanggaran etik," tandas Agung.

go/aha





Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene bersama tim menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan penataan layanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Doris Sylvanus Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa (7/10/2025). Foto:



TNP
PARLEMEN

Perempuan Parlemen

SCAN ME



SAKSIKAN HANYA DI
[HTTPS://TVRPARLEMEN.DPR.GO.ID](https://tvrparlemen.dpr.go.id)



youtube @tvrparlemen



@tvrparlemen



Sampaikan aspirasi Anda melalui
SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344



DPR RI



DPR RI



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri